

## ABSTRAK

### **ANALISIS PERBANDINGAN KOLEKTIBILITAS IURAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI PROGRAM KADER JKN-KIS PADA SEGMENT PESERTA PBPB BPJS KESEHATAN KEDEPUTIAN WILAYAH JAWA BARAT**

**Reni Cucu Sumarni**  
**17/417304/PEK/22867**

Implementasi program Kader JKN-KIS yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan sejak tahun 2017 memberikan harapan baru akan dapat tertagihnya iuran peserta segment Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPB) yang selama ini menjadi pekerjaan rumah yang masih belum bisa diselesaikan dari tahun ke tahun. Tingginya potensi iuran tak tertagih atau lebih dikenal dengan tunggakan iuran yang disumbang oleh peserta BPJS Kesehatan segment PBPB membuat angka defisit atau lebih dikenal dengan *mismatch* semakin lebar.

Disisi lain angka klaim yang digelontorkan untuk peserta segment PBPB merupakan yang paling tinggi dibandingkan segment peserta lainnya. BPJS Kesehatan di Kedepatian Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang menjadi *pilot project* pertama Implementasi program Kader JKN-KIS ini, sehingga tepat rasanya untuk menjadikan Kedepatian Wilayah Jawa Barat ini menjadi sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah BPJS Kesehatan yang berada dalam lingkup Kedepatian Wilayah Jawa Barat dengan periode pengamatan tahun 2016–2018. Kolektibilitas iuran dipilih karena merupakan cerminan keberhasilan BPJS Kesehatan dalam melakukan upaya penagihan dan melakukan optimalisasi penagihan iuran sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keberlangsungan program. Penelitian ini menggunakan *Paired Sample T-Test*. Variabel dependen sebagai pengukuran dalam penelitian ini adalah kolektibilitas segment PBPB. Variabel independen yang digunakan yaitu program Kader JKN-KIS. Periode dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Periode I (Bulan April Tahun 2016 – April 2017) adalah 1 tahun sebelum implementasi program Kader JKN-KIS. Periode II (Bulan Mei Tahun 2017 – Mei 2018) adalah 1 tahun setelah implementasi program Kader JKN-KIS.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan, artinya rata-rata kolektibilitas iuran sebelum dan sesudah implementasi program Kader JKN-KIS berbeda signifikan.

*Kata Kunci: Kader JKN-KIS, Segment PBPB, Defisit*

## **ABSTRACT**

### **COMPARISON ANALYSIS OF PREMIUM COLLECTIBILITY BEFORE AND AFTER KADER JKN-KIS PROGRAM IN PBPU SEGMENT BPJS KESEHATAN REGION OF WEST JAVA**

**Reni Cucu Sumarni**  
**17/417304/PEK/22867**

*Implementation Kader JKN-KIS program run by BPJS since 2017 to give new hope participants will be uncollectible dues not receiver wage worker segment (PBPU), which has become a chore that still unsolved from year to year. The high potential for doubtful dues or better known as delinquent dues contributed by participants BPJS PBPU segment scoring mismatch any widening. On the other hand spending claims for PBPU segments is the highest compared to other participants segments. Deputy Health BPJS in West Java became one of the first pilot project implementation Kader JKN-KIS program, so it seems appropriate to make this West Java Deputy sampled in this study. The population in this study is BPJS that are within the scope of the Deputy Regional West Java with the observation period from 2016 to 2018 year. Collectable dues selected because it is a reflection of the success BPJS Health in its efforts to optimize billing and collection fees as a form of responsibility for maintaining the continuity of the program. This study uses Collectable dues selected because it is a reflection of the success BPJS Health in its efforts to optimize billing and collection fees as a form of responsibility for maintaining the continuity of the program. This study uses Collectable dues selected because it is a reflection of the success BPJS Health in its efforts to optimize billing and collection fees as a form of responsibility for maintaining the continuity of the program. This study uses Paired Sample T-Test. As the dependent variable in this study is the measurement of segment PBPU collectibility. The independent variables were used that JKN Kader-KIS program. Period in this study is divided into two (2) as follows: Period I (April 2016 - April 2017) is one year prior to the implementation of Cadre JKN-KIS program. Period II (In May of Year 2017 - May 2018) is one year after the implementation of the program Kader JKN-KIS.*

*The results showed a significant difference, meaning the average collectability dues before and after implementation Kader JKN-KIS program differed significantly.*

*Keywords: Kader JKN-KIS, Segment PBPU, Mismatch*